



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Majapahit No.: 54. MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071
Fax. (0370) 633961

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id E-Mail : dislhk@ntbprov.go.id

**Laporan Layanan Informasi Publik
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Mataram, April 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPIDP Dinas LHK Provinsi NTB.

Laporan Pelayanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Mataram, April 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	2
III. Layanan Informasi Publik	9
IV. Penanganan Keberatan, Sengketa Informasi dan Kendala	20
V. Rekomendasi serta Rencana Tindak Lanjut	21
VI. Lampiran	22

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	3
Tabel 2. Daftar Permohonan Informasi Publik secara Online Tahun 2022	9
Tabel 3. Jumlah Akses terhadap Dokumen Informasi Publik Tahun 2022	7
Tabel 4. Jumlah publikasi program/ kegiatan secara online Tahun 2022	18
Tebel 5. Jumlah publikasi program/kegiatan Balai Lingkup Dinas LHK NTB secara online Tahun 2022	19

I. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Di era 4.0 saat ini, setiap orang mampu mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Kebutuhan Informasi saat ini tidak lagi untuk kalangan tertentu saja, tetapi hampir semua lapisan masyarakat seakan haus akan informasi yang *ter-update*. Setiap orang bebas menyajikan informasi dan mengakses informasi. Salah satu ciri negara demokratis adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Pemenuhan hak tahu masyarakat merupakan perwujudan hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat untuk memberi jaminan akan hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses serta latar belakang sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu keterbukaan Informasi Publik juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Dalam Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Provinsi NTB kemudian dibentuklah PPID Pembantu pada tiap-tiap SKPD. Salah satunya adalah PPIDP Dinas LHK Provinsi NTB.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2022, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Pada tahun 2022, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Provinsi NTB cukup memadai untuk melaksanakan kegiatannya, namun memang terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, sehingga perlu dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarpras yang dimiliki yaitu:

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID, terdiri dari :
 - a) 2 unit Laptop
 - b) 1 unit kipas angin
 - c) 1 unit Printer
 - d) Jaringan internet
 - e) Meja dan ruang tunggu
 - f) Buku perpustakaan lingkungan hidup dan kehutanan
 - g) Rak buku dan arsip
 - h) Papan tulis (white board)
 - i) Buku Agenda
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, terdiri dari :
 - a) Website dengan alamat <https://dislhk.ntbprov.go.id>
 - b) 1 unit Kamera digital (mirrorless)
 - c) 1 unit scanner portable
 - d) 1 unit smartphone

Selain sarana dan prasarana, PPID Dinas LHK juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 821/111/Kpts/Skrt-Dislhk/2020 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Personil PPIDP terdiri dari 57 orang yang merupakan perwakilan dari tiap Dinas LHK Provinsi NTB dan UPTD lingkup Dinas LHK Provinsi NTB. Adapun klasifikasinya adalah PNS pada Dinas LHK Prov. NTB, Tenaga Pendukung Perencana Bidang LHK, dan Tenaga Bakti Rimbawan yang merupakan Sarjana Kehutanan. Belum tersedia tenaga khusus yang terkait dengan teknologi informasi.

Tabel 1. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
 Nomor : 188 / 41.1 /Kpts/Skrt-Dishk/2022
 Tanggal : 2 Februari 2022
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam PPIDP
1.	Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Atasan PPID Pembantu
2.	Samsudin, S.Hut., M.Si/ Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Prov. NTB
3.	Helmi Rahman, S.Hut., M.ForSc&Mgt/ Sub Koordinator Program	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Prov. NTB
4.	Dian Sosianti Handayani, S.T./ Pranata Humas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
5.	Bayu Adiprasetya/ Staf Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6.	Rosmayadi, S.Kom/ Tim Kreatif Zero Waste	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
7.	Resya Putri Hadi Febryana / Tim Kreatif Zero Waste	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
8.	Dwiyana Pratiwi, S.Hut/ Staf Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
9.	Ibnu Siswoyoga Nugroho, S.Hut/ Staf Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
10.	Zainuddin Irawan, S.Hut/ Staf Sub Bagian Program	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
11.	Nadya Betari, S.T./Staf Sub Bagian Program	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi

	Program	Dokumentasi
11.	Nadya Betari, S.T./Staf Sub Bagian Program	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
12.	M. Reza Azhari Putra/Staf Bidang Pengelolaan DAS, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
13.	L. Rudi Hidayat/Staf Sub Bagian Umum	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
14.	Banie Agung Muhamad, S.Hum/ Tim Kreatif Zero Waste	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
15.	Hadian, S.Kom/ Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
16.	Astan Wirya, S.H., M.H/Sub Koordinator Penegakan Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
17.	Mulyadi Gunawan, S.Hut/Sub Koordinator Pengaduan dan Pengawasan	Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
18.	Ulii Amri, S.Hut/ Staf Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan	Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Z

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam PPIDP
19.	Kepala Seksi Evaluasi Laboratorium Balai Laboratorium Lingkungan	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai Laboratorium Lingkungan
20.	Kasubbag TU Balai Tahura Nuraksa	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai Tahura Nuraksa
21.	Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Barat	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Rinjani Barat
22.	Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Timur	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Rinjani Timur
23.	Kasubbag TU Balai KPH Sejorong Mataiyang	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Sejorong Mataiyang

24.	Kasubbag TU Balai KPH Batulanteh	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Batulanteh
25.	Kasubbag TU Balai KPH Orong Telu	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Orong Telu
26.	Kasubbag TU Balai KPH Brang Beh	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Beh
27.	Kasubbag TU Balai KPH Ropang	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ropang
28.	Kasubbag TU Balai KPH Ampang Plampang	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Plampang
29.	Kasubbag TU Balai KPH Ampang Riwo	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Riwo
30.	Kasubbag TU Balai KPH Tambora	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Tambora
31.	Kasubbag TU Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Toffo Pajo Soromandi
32.	Kasubbag TU Balai KPH Maria Donggomassa	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Maria Donggomassa
33.	Kasubbag TU Balai KPH Brang Rea Pucak Ngengas	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Rea Pucak Ngengas
34.	Kasubbag TU Balai KPH Pelangan Tastura	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Pelangan Tastura
35.	Kasubbag TU Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Madapangga Rompu Waworada
36.	Kasubbag TU Balai TPA Regional	Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai TPA Regional


**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,**

Ir. MADANI MILKAROM, BSc.F.,M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630405 198903 1 019

III. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan online dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Permohonan informasi publik yang tercatat tahun 2022 dilakukan melalui permohonan online yang tersedia pada website Dinas LHK Prov. NTB (<https://dislhk.ntbprov.go.id/permohonan-informasi/>) dan melalui e-mail resmi Dinas LHK NTB sebanyak 23 permohonan, sedangkan permohonan data secara langsung ke bagian PPID pada Tahun 2022 sejumlah 13 permohonan (daftar terlampir).

Tabel 2. Daftar Permohonan Informasi Publik secara Offline Tahun 2022.

No	Pemohon	Jenis Informasi	Tanggal Permintaan	Tanggal Jawaban	Keterangan
1	Perseorangan (Adilah Putri)	Informasi terkait Uji Laboratorium	22/9/2022	26/9/2022	Diarahkan ke Labling
2	Perseorangan (Shoiful Abidin A)	Data terkait DAS Pulau Lombok	22/9/2022	22/9/2022	Diarahkan ke Bidang PDAS-RPM
3	Perseorangan (Sapiin)	Informasi Syarat UKL-UPL Pertambangan	08/11/2022	09/11/2022	Diarahkan ke Bidang PPLH
4	Perseorangan (Iwan Haryono)	Data Kualitas Air Sungai Jangkok 2018-2022	08/11/2022	15/11/2022	Diarahkan ke Bidang PSPL dan PPLH
5	Perseorangan (M.Rifai)	Permohonan informasi terkait Kawasan Hutan di Kec. Empang	11/11/2022	17/11/2022	Diarahkan ke Bidang PH
6	Perseorangan (Siti Rostiana)	Data Kualitas Air Sungai Jangkok	15/11/2022	15/11/2022	Diarahkan ke Bidang PSPL dan PPLH
7	Bowo Susatyo, MT	Data terkait penurunan kualitas hutan dan LH	27/8/2022	29/8/2022	Diarahkan ke Bidang PPLH

8	Assavita Khairunnisa	Informasi Data RKH	6/9/2022	6/9/2022	Diarahkan kepada Bidang Umum
9	GMPLB	Audiensi	8/9/2022	8/9/2022	Diarahkan kepada Kepala Dinas LHK
10	Subagyo (PT. SATP)	Laporan UKL- UPL	8/9/2022	8/9/2022	Diarahkan kepada Bidang PPLH
11	Riyanti Maharani Ilyas	Permohonan data informasi Topografi	21/10/2022	21/10/2022	Diarahkan kepada SubbagUmum
12	Adeinna (BWS Nusa Tenggara)	Permohonan Data Contoh Dokumen SPPL	29/10/2022	29/10/2022	Diarahkan ke Bidang PPLH
13	Perseorangan (Hilyana)	Permohonan data kualitas sungai ancar 2012-2022	29/12/2022	11/1/2023	Diarahkan ke Bidang PPLH dan PSPL

Tabel 3. Daftar Permohonan Informasi Publik secara Online Tahun 2022

No	Pemohon	Jenis Informasi	Tanggal Permintaan	Tanggal Jawaban	Keterangan
1	Aulia Dian Febriani	1. Statistik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 - 2021 (5 tahun terakhir) 2. Data kerusakan lahan hutan di NTB	2022-01-07		
2	Alwafi Ridho Subarkah	Informasi yang dibutuhkan: 1. Peta lahan terbuka hijau yang ada di NTB secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 2. Program yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB tiga tahun terakhir	2022-01-06		
3	Lalu Ardian Hadi	Data persebaran lokasi tempat tumbuh buah Renggak (Amomum dealbatum Roxb.) di Pulau Lombok	2022-01-10		
4	M.Rifki	Dengan ini, saya meminta apakah ada data mengenai penanaman mangrove di labuhan haji lombok timur, tepatnya di sekitar muara pantai saya lihat ada mangrove. Berapa yang di tanam dulu, tahun berapa, dan jenis mangrove nya. Terimakasih. Mohon responnya.	2022-01-20		

5		<p>Kami berencana permohonan uji kualitas air limbah atas usaha kami, jenis usaha tambak udang vaname di Kabupaten Sumbawa. Adapun persyaratan yang harus kami penuhi, apa saja. Kemudian biayanya berapa ?. Jika ada formulir atau contoh permohonan, kami berharap bisa mendapatkan melalui Surat Elektronik (Email).</p> <p>Berdasarkan Arahan yang didapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Parameter pengujian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecerahan 2. Kebauan 3. Suhu 4. PH 5. Salinitas 6. Oksigen Terlarut 7. Ammonium (NH₄) 8. Nitrit (NO₂) 9. Chlorine (Cl₂) 10. Fosfat (PO₄) 11. Organik Terlarut 12. Alkalinitas <p>Besar harapan kami, permohonan informasi publik kami ini ditanggapi dan mendapat jawaban secepatnya, atas perhatian dan kerjasamanya,</p>			
	DWI HERI MUSTIKA		2022-01-27		

		sebelumnya kami ucapkan terima kasih.			
6	Edi gunawan	Mohon di bantu, pepohonan d depan ruko jl. Sriwijaya tepatnya d samping bank BRI ada pohon yg rantingnya sangat membahayakan, karena sdh d lilit kabel listrik, dan kalau angin kencang rantingnya bisa membahayakan pengguna jalan. Jangan sampai sdh ada korban baru di tindak.	2022-02-15		
7	RIZKI SISTHANNISA	data luas RTH menurut kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2020	2022-03-16		
8	RIZKI SISTHANNISA	data luas RTH menurut kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2020	2022-03-16		
9	Anak Agung Putu Sidhiawan	Peta Resort Kembang kuning khususnya pos jaga jeruk manis	2022-05-14		
10	Dyke Gita Wirasisya	Yth. Petugas Pelayanan Informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Aplikasi permohonan ini saya berikan untuk mendapatkan informasi terkait perizinan pemanfaatan tanaman obat liar yang akan saya ambil di NTB. Tanaman tersebut akan saya pergunakan untuk penelitian doktoral	2022-06-09		

		<p>saya di luar negeri.</p> <p>Informasi yang saya butuhkan adalah bagaimana mekanisme permohonan izin kemudian dokumen serta kelengkapan lainnya yang perlu saya sertakan untuk melengkapi permohonan tersebut.</p> <p>Dikarenakan sampel tanaman ini akan saya pergunakan dalam penelitian di luar negeri, apakah saya membutuhkan izin dari kementerian lingkungan hidup? atukah cukup izin dari pemerintah provinsi saja?</p> <p>Terima kasih atas bantuan yang diberikan.</p>			
11	ANDANG SUMEDI	<p>1. Surat Keterangan Rencana Kota Lombok barat untuk pengurusan KRK</p> <p>2. Dokumen lingkungan izin Lokasi Amdal</p>	2022-06-23		
12	Nanda gustiawan	<p>saya minta tolong informasi tentang program tunda terbang??</p> <p>apa prosedur pengajuannya, kriteria, Dan syaratnya??</p>	2022-07-01		
13	Assavira Khairunisa	<p>Ingin meminta data :</p> <p>1. Kondisi Ruang Terbuka Publik/Hijau Kecamatan Selong</p> <p>2. Luasan Taman Kota di Kecamatan Selong</p>	2022-08-29		

14	Assavira Khairunisa	Ingin meminta data : 1. Kondisi Ruang Terbuka Publik/Hijau Kecamatan Selong 2. Luasan Taman Kota di Kecamatan Selong	2022-08-29		
15	Assavira Khairunisa	Ingin meminta data : 1. Kondisi Ruang Terbuka Publik/Hijau Kecamatan Selong 2. Luasan Taman Kota di Kecamatan Selong	2022-08-29		
16	Kameliasari	1. Peta shapefile Tutupan Lahan Kabupaten Dompu, NTB 2. Peta shapefile Jenis Tanah Kabupaten Dompu, NTB	2022-09-20		
17	Ardiansyah	1. Mohon data terkait pembukaan lahan baru di wilayah kecamatan lambu kab. bima, NTB 2. Apa Program Prioritas Dlhk NTB di wilayah Maria Donggo masa kec. lambu kab.bima 3. bagaimana langkah Komunitas/ Organisasi yang begron di bidang lingkungan untuk memdapatkan kepercayaan pemerintah	2022-09-29		
18	Sapiin	Sarat UKL UPL pertambangan	9/11/2022		PPLH
19	IWAN HARYONO	Data Kualitas Air Sungai Jangkok dari tahun 2018-2022	9/11/2022	15/11/2022	PSPPL & PPLH
20	M.RIFAI	Saya ingin Mengetahui Informasi Tentang Wilayah mana saja dikawasan Hutan Di	12/11/2022	17/11/2022	PH

		kecamatan Empang, kabupaten sumbawa, Yang dilarang pemerintah untuk mengarap lahan yang akan ditanami Tanaman Palawija..			
21	Siti Rostiana	Data kualitas air das jangkok tahun 2019-2022	15/11/2022	15/11/2022 2	PSPPL & PPLH
22	muhammad al awali salahuddin	Terkait fungsi jasa ekosistem mangrove tinggi salah satunya adalah menyerap karbon, dengan isu perubahan iklim terkait karbon dan alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan servis ekosistem melalui kegiatan restorasi			PDASRPM
23	Wenny Amaliah	Informasi lengkap terkait jumlah sampah, jenis-jenis sampah, sumber sampah di Propinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari, Desa Kekait.			PSPPL

Penyediaan informasi publik secara online/soft copy bisa di unduh oleh publik melalui website Dinas LHK Provinsi NTB pada menu **Informasi Publik**. Dokumen yang tersedia yaitu Daftar Informasi Publik, Pejabat PPID, SOP Pelayanan, Dokumen Perencanaan, Dokumen pelaporan, Peraturan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Materi Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Data dan Statistik LHK, serta Peta Tematik Kehutanan. Ketersediaan informasi tersebut sesuai dengan yang tertera pada Daftar Informasi Publik Dinas LHK Provinsi NTB.

Tabel 4. Jumlah Akses terhadap Dokumen Informasi Publik Tahun 2022

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
1	PPID	SK Pejabat Pengelola Informasi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	3

		Daftar nama dan kontak Pejabat Dinas LHK Prov.NTB	5
		Laporan layanan dan akses informasi publik DinasLHK Provinsi NTB Tahun 2017	0
		Laporan layanan dan akses informasi publik DinasLHK Provinsi NTB Tahun 2018	0
		Laporan layanan dan akses informasi publik DinasLHK Provinsi NTB Tahun 2019	0
2	DIP	Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021	1
		Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	
		Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019	
		Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2018	0
		Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2017	0
3	SOP Pelayanan	SOP Uji Konsekuensi	2
		SOP Pendokumentasian Informasi	1
		SOP Penetapan DIP	1
		SOP Informasi Dikecualikan	0
		PERKI No. 14 Thn. 2010	0
		UU No. 14 Tahun 2008	2
		SOP Pengajuan Dokumen AMDAL	2
		SOP Pengaduan Kasus Lingkungan	2
		SOP Validasi KLHS	5
		SOP Penyidikan	15
		SOP Penegakan Hukum	7
		SOP Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	10
		SOP Operasi GabunganPengamanan Hutan	10
		SOP Verifikasi Kayu Tanah Milik	15
		SOP Kemitraan Kehutanan	20
		SOP Izin Limbah B3	20
		SOP IUPHKm	23
		SOP Bibit Bakti Sosial	30
		SOP Pengajuan Dokumen AMDAL	27
		SOP Pengaduan Kasus Lingkungan	35
		SOP Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan	30
		SOP Surat Menyurat	15
		SOP Pengelolaan Keuangan	10
4	Dokumen Perencanaan	Desain Tapak Wisata Alam Pantai Ria BKPHampang Riwo Soromandi	5

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		Desain Tapak Wisata Alam Gili Balu BKPH Sejorong Mataiyang Brangrea	14
		Desain Tapak Wisata Alam Air Terjun Panca BKPH Ampang Riwo Soromandi	19
		Rencana Umum Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019	14
		Rencana Aksi Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2019	11
		Rancangan Rencana Strategis Dinas LHK Prov. NTB Tahun 2018-2023	13
		Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2020	13
		Perjanjian Kinerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2019	12
		Indikator Kinerja Utama Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2019	8
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Dinas LHK Provinsi NTB beserta UPTD.	6
		Anggaran KAS Dinas LHK Provinsi NTB beserta UPTD Tahun 2019	3
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas LHK Provinsi NTB beserta UPTD Tahun 2018	3
		Rencana Kerja Tahunan Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2018	5
		Rencana Aksi Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2018	1
		Perjanjian Kinerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2018	1
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Dinas LHK Provinsi NTB beserta UPTD.	1
		Anggara Khas 2018	3
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2017	3
		Revisi Anggaran Khas 2017	1
		Perjanjian Kinerja Tahun 2017	2
		Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018	1
		Rencana Aksi Tahun 2017	1
		Rencana Kerja Dinas LHK Prov. NTB Tahun 2018	5
		Rencana Strategis Dinas LHK Prov. NTB Tahun 2013-2018 (Revisi)	3
		Anggaran Kas Dinas LHK Tahun 2017	1
		Rencana Umum Pengadaan 2017	1

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		Draft Rencana Kerja Tahun 2018	2
		Draft Revisi Rencana Strategis Dinas LHK 2013-2018	1
		Ringkasan DPA Tahun 2017	1
		Master Plan Wisata Alam NTB	3
		Desain Tapak Wisata Alam Tahura Nuraksa	3
		Site Plan Wisata Alam Tahura Nuraksa	2
		Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	3
		Anggaran Kas Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	4
		Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	1
		Anggaran Kas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	0
		Rencana Umum Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	2
		Perjanjian Kinerja (PK) Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	10
		Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	10
		Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	10
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	11
		Rencana Aksi (RA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	6
		Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023	7
		Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020	4
5	Dokumen Pelaporan	Laporan Keuangan Dinas LHK NTB Tahun 2018	2
		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2018	4
		Daftar Kepatuhan Pelaporan LHKPN Pejabat Dinas LHK Provinsi NTB	3
		Laporan Aset Dinas LHK Tahun 2018	2
		Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas LHK Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018	2
		Laporan layanan dan akses informasi publik Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2018	4

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		Neraca Keuangan Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2017	1
		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2017	3
		Capaian Perjanjian Kinerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2017	1
		Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	1
		Laporan Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	2
		Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah BLHP Tahun 2016	1
		Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Tahun 2016.	1
		Laporan layanan dan akses informasi publik Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2019	4
		Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019	4
		Laporan Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019	3
		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019	1
6	Peraturan Bidang LHK	Perda No. 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah	35
		Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660-408 Tahun 2019 tentang Penetapan Logo Resmi Rinjani - Lombok Biosphere Reserve UNESCO.	2
		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3
		Naskah Akademik dan Rancangan Perda Pengelolaan Hutan	2

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		MoU Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram Provinsi NTB	13
		Naskah Akademik dan Rancangan Pergub Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3
		Rancangan Perda Pengelolaan Sampah Provinsi NTB	12
		Peraturan Gubernur NTB Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi NTB	6
		Surat Keputusan Gubernur NTB Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta Provinsi Nusa Tenggara Barat	19
		Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	18
		Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	20
		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	8
		MoU Gubernur NTB dengan Kabupaten/Kota di NTB tentang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi	81
		MoU Gubernur NTB dengan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Provinsi NTB	59
		Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2013-2023.	20
		Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	1
		Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	1
		Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah	2

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	
		Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.	1
		Pergub Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah	4
		Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan	1
7	Materi Penyuluhan LHK	Panduan Perhutanan Sosial	21
		Leaflet Kemitraan Kehutanan	49
		Booklet Pohon Sahabat Air	23
		Booklet Potensi Desa Wisata Sekitar Kawasan Hutan	19
		Leaflet Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Madu	15
		Leaflet Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Durian	43
		Leaflet Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	25
		Leaflet Perhutanan Sosial	19
		Leaflet Profil KPH	14
		Leaflet Sosialisasi Mari Menanam	17
		Leaflet Pengelolaan Sampah	20
		Leaflet Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan	41
		Leaflet Proper 2017	20
		Potensi Rajumas di KPH Tambora	26
		Profil Balai KPH Tambora	5
		Profil Bukit Pergasingan, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur.	26
		Profil Gili Petagan, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur.	21
		Profil Gili Sulat dan Gili Lawang, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur.	22
		Panduan Media sosial dan Website Untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11
8	Dokumen data dan statistik	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2017	53
		Statistik Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2016	13
		Hasil Penelitian Dinas LHK Provinsi NTB	4
		Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2016	3

No	Informasi Publik	Jenis Informasi	Jumlah Unduhan
		Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.	7
		Buku Statistik Kehutanan NTB Tahun 2015	5
		Buku Statistik Kehutanan NTB Tahun 2014	2
		Buku Statistik Kehutanan NTB Tahun 2013	2
		Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2018	1
		Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2019	2
9	Dokumen peta tematik kehutanan	Peta Indeks Kualitas Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai Dengan Tahun 2018	50
		Peta Indeks Kualitas Air Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai Dengan Tahun 2018	33
		Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov. NTB	67
		Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan di P. Lombok	54
		Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan di P. Sumbawa	55
		Peta Lahan Kritis pada Kawasan Hutan NTB	51
		Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 1	72
		Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 2	72
		Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 3	68
		Peta Indikatif Potensi Konflik Kawasan Hutan NTB	65
		Peta Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan NTB	82
		Peta Kondisi Tutupan Pohon NTB	61

Selain melalui website Website (<https://www.dislhk.ntbprov.go.id>), publikasi pelaksanaan program/ kegiatan juga dilakukan melalui saluran media sosial Dinas LHK Provinsi NTB yaitu facebook <https://www.facebook.com/dislhk.ntbprov>), Instagram, Website (www.dislhk.ntbprov.go.id), dan Youtube (www.youtube.com/DislhkNtb). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga memiliki akun official untuk program khusus program strategis pemerintah yaitu Facebook (<https://www.facebook.com/ntbasridanlestari/>) dan Instagram (<https://www.instagram.com/ntbbebassampah/>).

IV. PENANGANAN KEBERATAN, SENGKETA INFORMASI DAN KENDALA

Tim PPIDP Dinas LHK Provinsi NTB dalam pelaksanaan tugasnya pada Tahun 2021 terkait penanganan Keberatan, Sengketa Informasi serta Kendala memiliki catatan sebagai berikut :

1. Sepanjang Tahun 2022, tidak terdapat penanganan keberatan maupun sengketa informasi pada PPIDP Dinas LHK Prov. NTB.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPIDP Dinas LHK Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. Kurang tersedianya SDM dibidang teknologi informasi dan ilmu komunikasi ;
 - b. Belum tersedia anggaran khusus PPID tahun 2022;
 - c. Belum tertibnya penggunaan formulir permohonan informasi pada ruang pelayanan PPID sehingga permohonan informasi tidak terdokumentasi dengan baik;
 - d. Form pengisian informasi kegiatan bidang dan balai belum terlaksana dengan baik
 - e. Layanan pengaduan dan informasi belum melalui satu pintu;
 - f. Terbatasnya kemampuan SDM dari Bidang dan Balai dalam pengelolaan Informasi.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM baik di lingkup dinas dan UPTD dalam hal pelayanan informasi serta kemampuan menghasilkan bahan publikasi berupa narasi audio visual. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPIDP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat lebih maksimal kedepannya. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

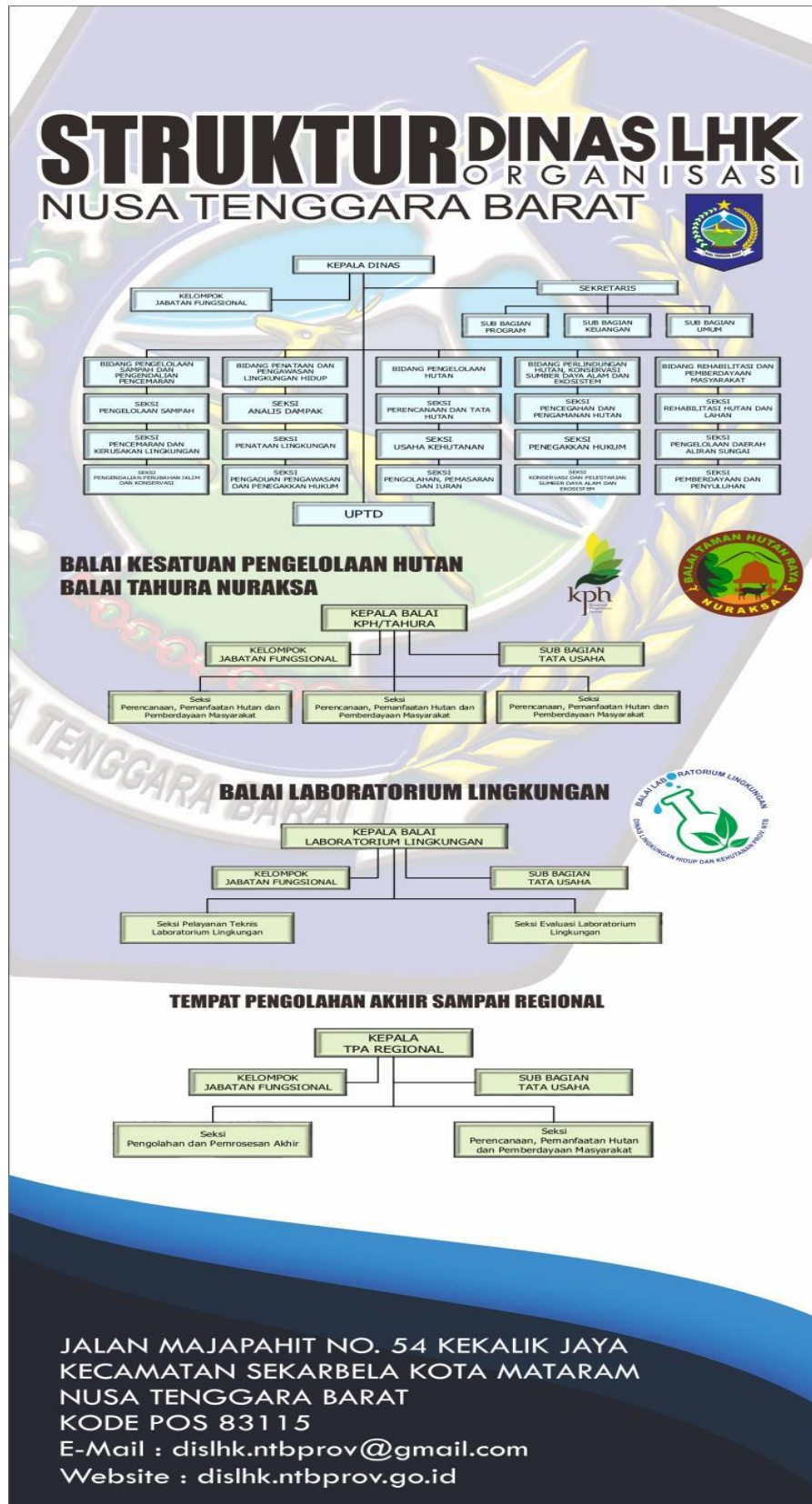
1. Mengupayakan tersedianya SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi;
2. Mensosialisasikan kepada bidang dan balai agar setiap permintaan data dan informasi melalui PPID dengan mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku;
3. Mengupayakan sistem penghimpunan database yang terintegrasi antar bidang dan balai.
4. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait pengolahan data dan informasi dalam hal ini baru terlaksana dalam satu program kegiatan yaitu Bimtek NTB Satu Data.
5. Lebih berperan aktif terhadap penyediaan informasi yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan balai.

VI. LAMPIRAN

1. Foto Ruangan PPID



2. Foto Struktur Organisasi Dinas LHK NTB

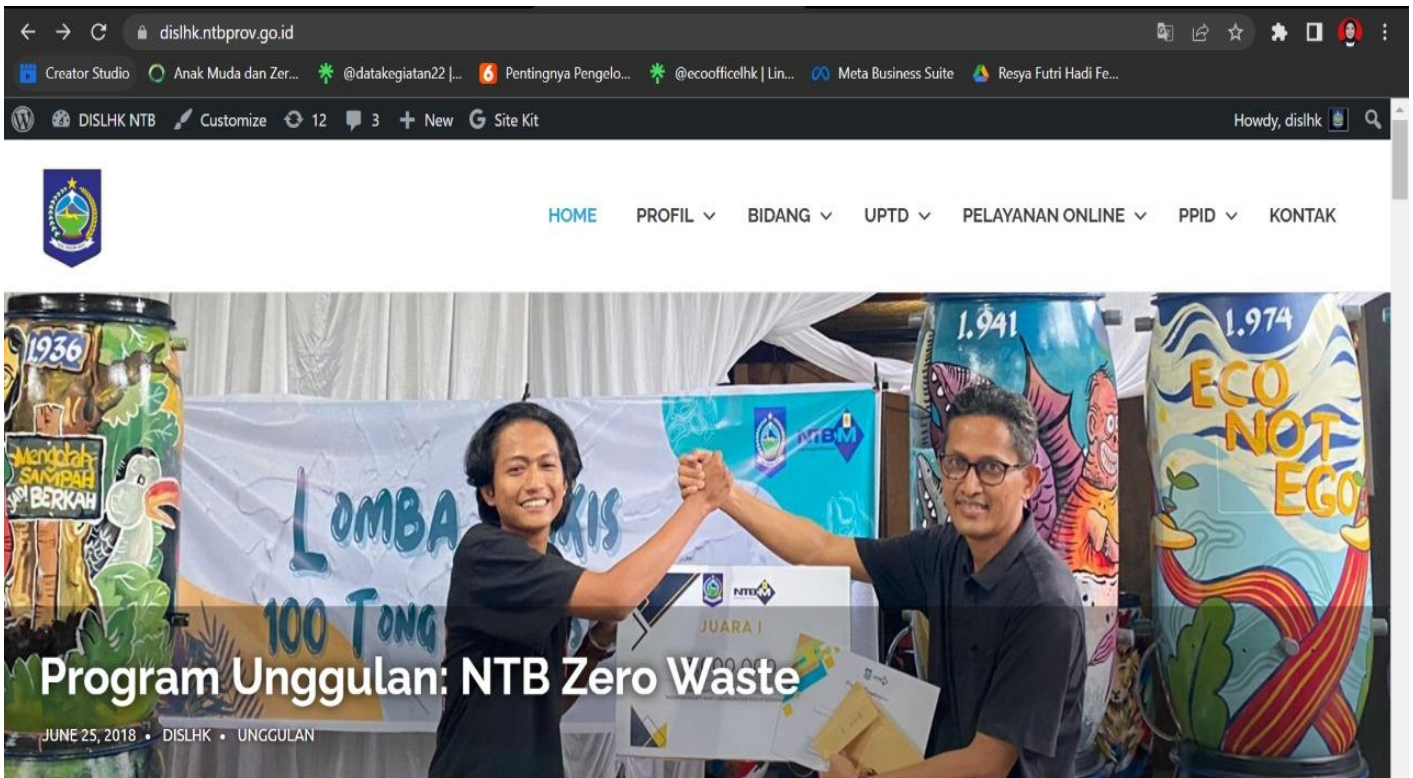


3. Foto Peralatan PPID

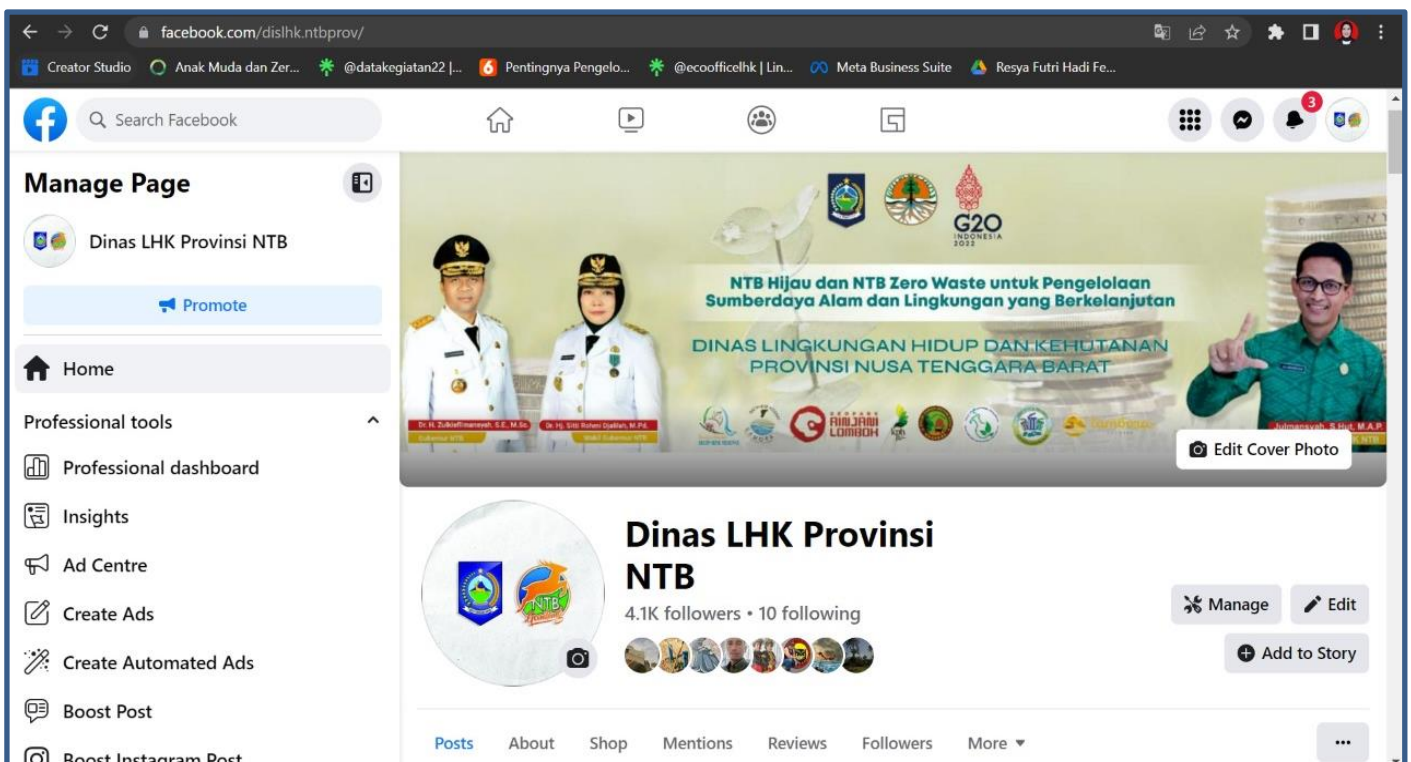


4. Halaman depan Web, Facebook, Instagram, Youtube (dalam bentuk gambar)

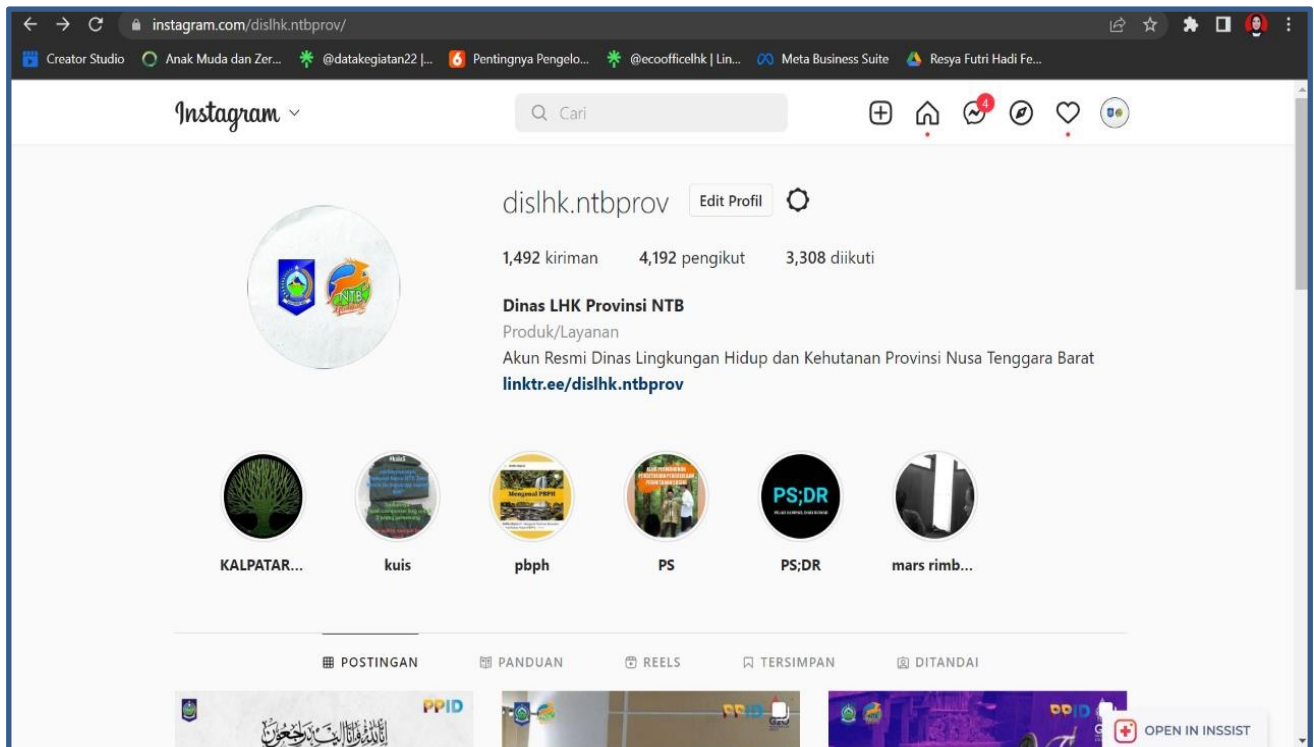
Website Dinas LHK NTB



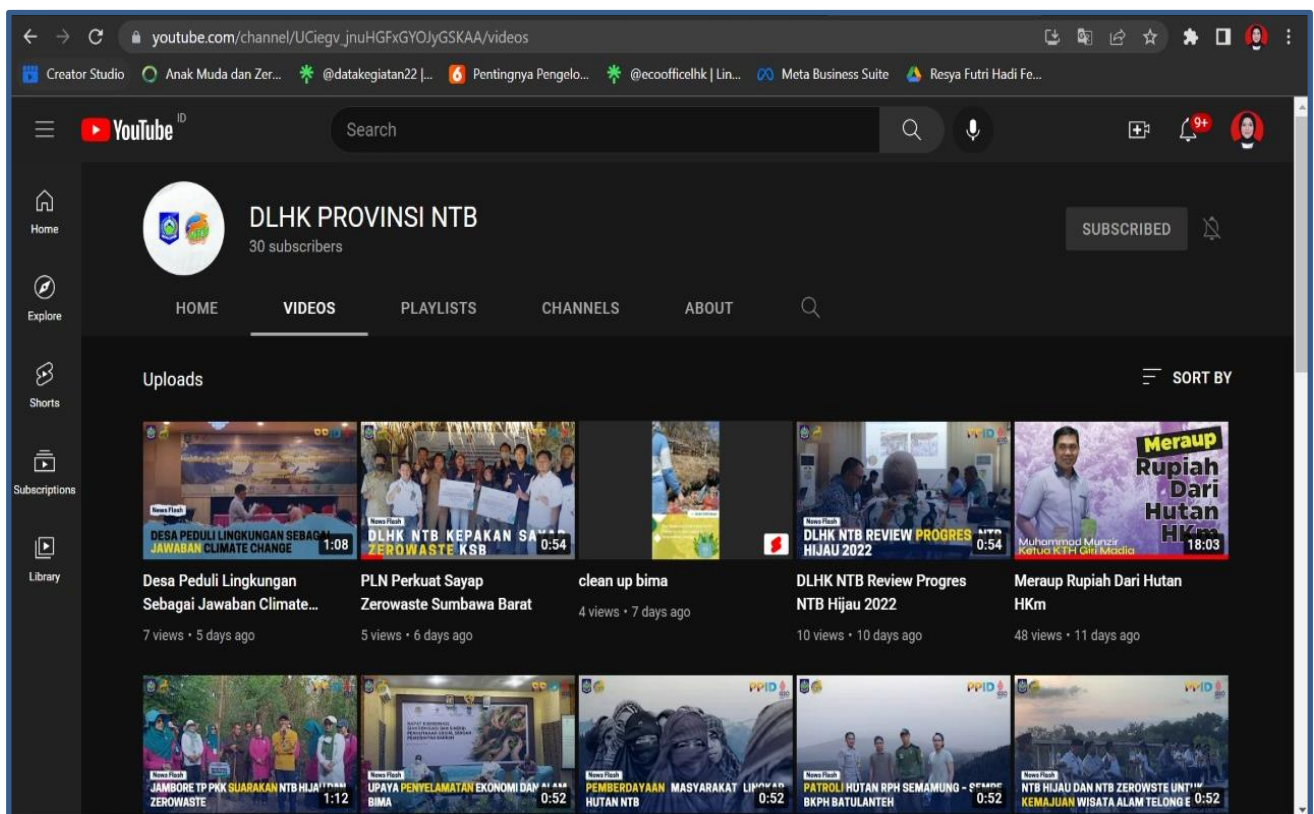
Facebook Dinas LHK NTB



Instagram Dinas LHK NTB



Youtube Dinas LHK NTB



Halaman akun Media Sosial NTB Zero Waste (Facebook, Instagram dan Youtube)

Facebook NTB Zero



Instagram NTB Zero



Youtube NTB Zero



Anlikasi lestari

